

## Peran LPMK dan BKM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tembalang

(Ridwan Dannar Daruwinata<sup>1</sup>, Dra.Wiwik Widayawati, M.Si<sup>2</sup>, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si<sup>3</sup>)  
D2B 008 063

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
JL. Prof Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, Kode pos 50239.  
website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

### **ABSTRAK**

Kajian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh LPMK dan BKM di Kecamatan Tembalang merupakan kajian yang menarik seiring dengan berkembangnya usaha-usaha dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Inti dari pemberdayaan yaitu merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan wilayah Kota Semarang kecamatan dilakukan oleh LPMK ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ) dan BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ). LPMK berorientasi kepada pemberdayaan seluruh masyarakat melalui kegiatan pembangunan/peningkatan sarana prasarana lingkungan pemukiman. Sedangkan BKM berorientasi kepada terhadap pemberdayaan rakyat miskin.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, program pemberdayaan di Kecamatan Tembalang di lakukan oleh LPMK ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ) dan BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) melalui tig aspek yaitu : aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan diikuti masyarakat yang membutuhkan. Kedua, pemberian bantuan modal dengan sistem kelompok dan ada proses bagi hasil antara penerima bantuan dengan lembaga pemberdayaan. Ketiga, lembaga-lembaga tersebut memiliki usaha sebagai sumber pemasukan yang kemudian di gunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Keempat, program pemberdayaan tersebut menyangkut perenovasian rumah tidak layak huni, pembangunan sumur artesis, pavingisasi jalan dan pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu. Kelima, pemberdayaan ini memiliki pola dan permodalan yang baik. Keenam, kurangnya sosialisasi oleh pihak pemerintah.

Kata kunci: pemberdayaan\_LPMK\_BKM

### **ABSTRACT**

The study of the Community Empowerment By LPMK and BKM in District Tembalang an interesting study along with the development efforts and the efforts to improve the welfare of society. Empowerment as the process develops, to be independent, to be self-help,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP 2008

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

strengthen the bargaining position of the lower layers of society against oppressive power strength in all areas and sectors of life. The essence of empowerment is a strategy to leverage the power and independence of the community. Community empowerment at the village area of Semarang district by LPMK (Institute for Village Empowerment) and BKM (Agency for Community Self-Reliance). LPMK oriented to empowering all people through the development / improvement of infrastructure neighborhoods. While BKM oriented towards empowerment of the poor.

The result of this research are as follows. First, empowerment programs in the Sub District Tembalang done by LPMK (Institute for Village Empowerment) and BKM (Agency for Community Self-reliance) through three aspects: social aspects, environmental aspects, economic aspects and followed communities in need. Secondly, the provision of capital to existing systems and processes group sharing between agencies beneficiaries with empowerment. Third, these institutions have a business as a source of income which is then used for the implementation of community development programs. Fourth, the empowerment program involves renovation of uninhabitable housing, construction of artesian wells, making paving roads and providing scholarships to poor students. Fifth, this empowerment has a pattern and well capitalized. Sixth, lack of socialization by the government.

Keywords: empowerment\_LPMK\_BKM

## 1. Pendahuluan.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan<sup>4</sup>. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan<sup>5</sup>.

Kecamatan Tembalang adalah merupakan bagian dari wilayah Kota Semarang. Sejak awal tahun 1980 di kecamatan Tembalang berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. Kegiatan ekonomi berkembang pesat hal tersebut ditandai dengan sejumlah komplek perumahan baru dibangun di wilayah ini dan semakin meningkat lagi sejak kampus UNDIP berpindah dan beroperasi di Kecamatan Tembalang. Perkembangan tersebut ternyata tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sebagian dari mereka tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dari kemajuan wilayah.

Pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tembalang dilakukan secara sinergik oleh dua lembaga yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana peran kedua lembaga tersebut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tembalang. Bagaimana kedua lembaga tersebut bekerja sama sinergis dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tembalang.

---

<sup>4</sup> Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002

<sup>5</sup> ibid. hal 317

Guna mengetahui peran kedua lembaga tersebut dalam kegiatan pemberdayaan dipilih 3 (tiga) kelurahan sebagai obyek sampel penelitian yaitu kelurahan Tembalang, kelurahan Tandang, dan kelurahan Mangunharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada ketua LPMK dan coordinator BKM kelurahan. Data sekunder diperoleh dari data monografi kecamatan Tembalang , kelurahan obyek penelitian, buku laporan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) 2012 dan buku laporan RWT (rembuk Warga Tahunan) 2012. Buku laporan Musrenbang adalah rencana pembangunan kelurahan tahunan dan dibiayai dana APBD Kota Semarang. Musrenbang merupakan program kerja rutin LPMK dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. RWT adalah merupakan daftar kegiatan pemberdayaan rakyat miskin kelurahan tahunan dari dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. RWT merupakan program kerja BKM tahunan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Metode yang digunakan untuk menjelaskan peran LPMK dan BKM dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tembalang adalah diskriptif kualitatif.

## 2. Pembahasan Hasil

### 2.1. Peranan LPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan pasal 10 Perda Kota Semarang nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan, LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Karena acuan yang dipergunakan dalam membahas peran LPMK adalah sama, maka peran LPMK dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat rutin di tiga kelurahan penelitian adalah relatif sama. Pada setiap akhir tahun LPMK menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan pembangunan (Musrenbang). Hasil musyawarah berupa daftar usulan rencana pembangunan sarana prasarana fisik lingkungan pemukiman, selanjutnya dibahas di tingkat kecamatan menjadi usulan rencana pembangunan ke Pemerintah Kota Semarang. Usulan yang telah disetujui Pemerintah Kota Semarang menjadi program rutin LPMK.

#### a. Program rutin

Program rutin LPMK adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman. Bentuk pembangunan di kelurahan Tembalang antara lain: saluran air, pengaspalan jalan, pavingisasi, talud sungai, betonisasi jalan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 250.000.000,- dan masing-masing proyek senilai RP. 25.000.000,- Program rutin di wilayah penelitian adalah sebagai berikut.

Sementara di Kelurahan Tandang pembangunan yang telah dilaksanakan menelan dana sebesar Rp. 249.500.000,- kegiatan pembangunan tersebut berupa: talud sungai ciliwung, gorong-gorong, pengaspalan jalan, talud saluran, pembuatan saluran, pembangunan balai RW, pelebaran jalan, pembangunan pos yandu.

Sedangkan pembangunan di Kelurahan Mangunharjo dengan menelan biaya sebesar Rp. 249.950.000,- yang digunakan untuk pembangunan: talud sungai, jalan lingkungan, talud gorong-gorong, saluran air, talud jalan, talud jalan tembus, kanstin jalan.

Ditinjau dari aspek jenis, lokasi dan volume pembangunan fisik lokasi pelaksanaan program kerja pembangunan sarana prasarana pemukiman pencapaiannya 100%.

Kendala yang dihadapi LPMK dalam pengendalian pembangunan tersebut adalah bahwa kewenangan menilai dan menentukan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Kota Semarang. LPMK hanya berperan dalam memastikan bahwa jenis, lokasi, dan volume kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Sistem swakelola juga berpotensi meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat membiayai pembangunan lingkungan dan meningkatkan prinsip transparansi dan akutabilitas pengelolaan anggaran.

b. LPMK berperan sebagai katalisator kepedulian masyarakat terhadap sesama

Dalam program kegiatan rehab rumah warga miskin bantuan BLM PNPM Mandiri Perkotaan LPMK di wilayah penelitian telah berhasil menjadi katalisator bagi kepedulian masyarakat dalam membantu sesama. Bantuan BLM rehab rumah miskin berkisar antara Rp.10.000.000,- hingga Rp.12.750.000,-/unit rumah sementara realisasi biaya pelaksanaan rata-rata mencapai Rp.17.000.000,-/unit. Kekurangan biaya tersebut dibantu secara bergotong-royong oleh masyarakat sekitar. Jumlah rehab rumah warga miskin di wilayah sampel adalah kelurahan Tembalang 12 unit, kelurahan Tandang 4 unit dan kelurahan Mangunharjo 3 unit.

c. LPMK membentuk unit lingkungan produktif.

Muara tujuan dari kegiatan pemberdayaan kemandirian masyarakat. Unit lingkungan produktif adalah unit pengelola hasil/manfaat untuk dimanfaatkan/dikonsumsi oleh warga masyarakat dan diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi pemberdayaan lingkungan. Bentuk unit lingkungan produktif di wilayah penelitian adalah pengelolaan air dari sumur dalam/artesis yang dibangun dengan sumber dana BLM PNPM maupun dari PSDA Kota Semarang. LPMK memfasilitasi forum musyawarah untuk menentukan tarif pembayaran retribusi pemakaian air dan distribusi alokasi pendapatan dari pembayaran tersebut. Di kelurahan Tembalang terbentuk 2 (dua) unit lingkungan produktif yaitu di 3 RT. Dan juga di kelurahan Tandang.

d. Program Khusus LPMK

Kelurahan Tembalang sejak pertengahan tahun 2011 mendapat hibah bantuan dana CSR BNI46 sebesar Rp.90.000.000,- untuk pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang dibiayai meliputi bantuan pengadaan alat peraga pendidikan, gaduh sapi, gaduh kambing dan pinjaman dana bergulir bagi warga miskin. Dalam pelaksanaan program tersebut LPMK dibantu oleh UNDIP yang bertindak sebagai fasilitator. Program ini diharapkan dapat membangkitkan pendapatan bagi pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Ditinjau dari aspek jenis, lokasi dan volume pembangunan fisik lokasi pelaksanaan program kerja pembangunan sarana prasarana pemukiman pencapaiannya 100%.

Kendala yang dihadapi LPMK dalam pengendalian pembangunan tersebut adalah bahwa kewenangan menilai dan menentukan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Kota Semarang. LPMK hanya berperan dalam memastikan bahwa jenis, lokasi, dan volume kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Sistem swakelola juga berpotensi meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat membiayai pembangunan lingkungan dan meningkatkan prinsip transparansi dan akutabilitas pengelolaan anggaran.

Model pelaksanaan seperti itu Hal demikian berpotensi menimbul kecurigaan dan kasebagai pengawas dan penerima hasil pisik pembangunan yang telah selesai tidak dapat melaksanakan kewenangan secara penuh.

## 2.2. Pemberdayaan oleh BKM

BKM adalah singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat bertindak sebagai pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin kelurahan dengan sumber dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Program tersebut terdiri dari pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

### 2.2.1 Pemberdayaan Lingkungan

Tujuan kegiatan pemberdayaan lingkungan adalah penyediaan sarana pisik yang dapat meningkatkan akses/pelayanan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi produktif warga miskin serta meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari.<sup>6</sup>

Jenis dan volume penyediaan sarana prasarana bangunan pisik dalam kegiatan pemberdayaan lingkungan di kelurahan obyek penelitian bervariasi hal ini tergantung dari kebutuhan, luas wilayah, jumlah penduduk dan merupakan hasil dari keputusan RWT. Jenis sarana prasarana bangunan pisik yang dibangun dalam program ini adalah terdiri rehab rumah warga miskin, penyediaan sarana prasarana air bersih dan pembangunan sarana prasarana lingkungan. Seperti diuraikan sebelumnya rehab rumah warga miskin dilaksanakan di semua kelurahan penelitian. Sedangkan penyediaan sarana prasarana air bersih hanya dilaksanakan di kelurahan Tembalang dan kelurahan Tandang. Kelurahan Tandang merupakan kelurahan yang memperoleh alokasi dana BLM untuk penyediaan sarana prasarana lingkungan paling besar. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayahnya yang merupakan perbukitan berkontur miring, merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduknya yang paling banyak. Jenis dan volume sarana prasarana pisik yang dibiayai BLM PNPM Mandiri tahun 2012 dengan biaya sebesar Rp. 223.550.000,- di gunakan untuk pasang saluran gorong-gorong dan dinding penahan tanah, pasang paving dan dinding container sampah, pasang paving jalan, pembangunan rumah pintar dan PAUD, pasang talud saluran, pasang paving jalan dan talud, pembuatan saluran air, pasang talud jalan, pembangunan gedung PAUD, perbaikan saluran air, jalan tembus perkeraaan beton, pasang talud dan saluran air, pembangunan gedung pos yandu, betonisasi jalan.

Sementara itu di kelurahan Mangunharjo pada tahun 2012 sarana prasarana pisik yang dibiayai BLM PNPM Rehab bangunan PAUD dan di kelurahan Tembalang tidak ada program penyediaan sarana prasarana pisik .

### 2.2.2. Pemberdayaan Ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu pinjaman dana bergulir dan unit usaha ekonomi.

Sasaran target program pinjaman dana bergulir adalah kelompok masyarakat miskin yang mempunyai usaha. Peminjam membentuk kelompok KSM (Kelompok Swadaya

---

<sup>6</sup> Sumber Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Masyarakat). Pada tahap awal setiap anggota diberi pinjaman Rp.500.000,-. Tanggung jawab pengembalian pinjaman merupakan tanggung jawab kelompok. Jumlah KSM, anggota dan dana bergulir disajikan dalam table berikut.

Tabel jumlah KSM, anggota dan dana bergulir program pinjaman bergulir 2012.

| No. | Kelurahan  | Jumlah KSM | Jumlah Anggota | Jumlah Dana Bergulir |
|-----|------------|------------|----------------|----------------------|
| 1   | Tembalang  | 27         | 135 orang      | 95.350.000           |
| 2   | Tandang    | 45         | 207 orang      | 309.250.000          |
| 3   | Manguharjo | 16         | 99 orang       | 56.000.000           |

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa program pinjaman bergulir telah dapat mengembangkan volume kegiatan usaha anggota hal ini dapat dilihat dari rata-rata pinjaman yang meningkat dari Rp.500.000,- menjadi Rp.706.296,- di kelurahan Tembalang Rp.1.493.960,- di Tandang dan Rp.583.333,- di kelurahan Manguharjo.

Di kelurahan Tandang terdapat 75 KSM tidak produktif yang tidak lancar dalam kewajiban mengembalikan pinjaman.

#### e. Unit usaha ekonomi

Unit usaha ekonomi adalah usaha bisnis yang menjual barang atau jasa. Unit usaha ekonomi hanya diselenggarakan di kelurahan Tembalang yaitu berupa warung serba usaha dan laundry. Program tahun 2012 ini telah bisa menghasilkan keuntungan Rp.3.350.000,-. Di kelurahan Manguharjo unit usaha ekonomi berupa unit jahit konveksi. Tenaga pelaksana dari unit ini berasal dari peserta pelatihan bidang pemberdayaan sosial.

#### 2.3. Pemberdayaan sosial.

Tiap langkah kegiatan P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan kesadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini hanya diselenggarakan di kelurahan Tembalang dan Manguharjo. Di kelurahan Tembalang adalah berupa bantuan peralatan sekolah kepada 15 anak sekolah dasar dan program mempekerjakan warga usia produktif tidak mempunyai pekerjaan pada warung serba usaha dan laundry. Sedangkan di kelurahan Manguharjo adalah pelatihan menjahit konveksi bagi remaja dan ibu-ibu rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan. Kegiatan disediakan bantuan alat berupa 3 mesin jahit, 1 mesin obras dan 1 unit mesin multiguna. Peserta pelatihan selanjutnya dipekerjakan pada unit usaha unit jahit konveksi yang dibentuk di kelurahan ini.

#### 3. Penutup

Program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat di wilayah penelitian dapat berjalan dengan baik namun masih menghadapi sejumlah kendala yaitu :

- Sejak tahun 2009 LPMK tidak lagi mendapatkan alokasi bantuan dana operasional dari pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut berdampak langsung terhadap operasional kegiatan LPMK. Kegiatan koordinasi melalui forum rapat menjadi tidak bisa diselenggarakan.

- b. Peran LPMK dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik lingkungan terbatas hanya sebagai penyusun usulan dan pengawas pada saat pelaksanaan, sedangkan pemilihan dan penentuan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait Pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dibawah pengendalian LPMK. Sistem swakelola juga berpotensi meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat membiayai pembangunan lingkungan dan meningkatkan prinsip transparansi dan akutabilitas pengelolaan anggaran. Sitem pemilihan dan pengangkatan pengurus BKM dilakukan dengan prinsip sukarela dan musyawarah mufakat. Dengan system seperti itu sulit diharapkan dapat menarik orang profesional untuk masuk dalam struktur pengurus BKM. Sementara itu disatu sisi pengelola kegiatan BKM mempunyai tanggung jawab yang besar baik dalam pengelolaan anggaran maupun tuntutan terhadap keberhasilan program pemberdayaan.

#### 4. Saran

- a. Guna memunculkan minat masyarakat untuk bergabung menjadi pengelola BKM , memberikan motivasi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maka dana bantuan operasional kegiatan BKM perlu ditingkatkan jumlahnya.
- b. Saat ini LPMK kelurahan tidak mendapat bantuan biaya operasional. Akibatnya kegiatan koordinasi LPMK sulit dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut payung hukum bagi peraturan pemberian bantuan dana operasional LPMK kelurahan perlu diterbitkan. Untuk sementara pemerintah kelurahan dapat menjadi dan menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya kegiatan koordinasi LPMK.
- c. Saat ini realisasi bantuan fisik dari pemerintah terhadap wilayah kelurahan adalah dalam bentuk fisik sudah jadi. dalam pengendalian kegiatan pembangunan di kelurahan hanya terbatas pada menerima bangunan fisik yang sudah jadi. Dalam rangka mengoptimalkan dana bantuan maka peran LPMK perlu ditingkatkan. LPMK perlu dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan mulai perencanaan, pemilihan rekanan pelaksanaan kegiatan bangunan fisik, serta pengawasan pelaksanaan.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan mulai dari keterbatasan data, kondisi lapangan, dan hasil wawancara. semua telah teratasi sehingga penelitian ini selesai. semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M.W Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep , Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Eko, Sutoro, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda.
- .....,2007, *Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika
- Kartasasmita, G. 1996. *Power and Empowermant: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mubyarto,1994,Keswadayaan Desa Tertinggal. Aditya Media, Yogyakarta
- .....,2008, *Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan*, Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta
- Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Laporan Tindak Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Madia
- Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Web:

KOMPAS.com 28 Desember 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

<http://semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/visi-dan-misi>